



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV - 2025

**BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANGKA BELITUNG**

Kompleks Perkantoran
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434
Email : op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bagian dari siklus akuntabilitas kinerja, dokumen ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, khususnya pada periode Oktober sampai dengan Desember 2025.

Penyusunan laporan ini berfungsi sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, serta instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas program kerja yang telah dijalankan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas realisasi kinerja SKIPM Pangkalpinang, baik dari aspek operasional karantina dan mutu, pengelolaan sumber daya, maupun pencapaian indikator prioritas lainnya sepanjang tahun 2025.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pegawai serta para pemangku kepentingan atas dukungan, kerja keras, dan kontribusi yang diberikan. Kritik serta saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kinerja dan kualitas pelayanan SKIPM Pangkalpinang di masa yang akan datang.

Pangkalpinang, 16 Januari 2026

Kepala



Ded. Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Strategi Organisasi	2
1.4. Sistematika Penyajian	2
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	3
2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	3
2.2. Pengukuran Kinerja	4
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1. Capaian Kinerja	6
3.2. Analisis dan Evaluasi	6
3.3. Realisasi Anggaran	17
3.4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	17
BAB 4. PENUTUP	18
4.1. Kesimpulan	18
4.2. Rekomendasi	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025	3
Tabel 2	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV 2025	17
Tabel 3	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV 2025	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Pangkalpinang	2
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja	6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) SKIPM Pangkalpinang Triwulan IV Tahun 2025 merupakan potret capaian kinerja organisasi selama periode Oktober sampai dengan Desember 2025. Penilaian tingkat keberhasilan sasaran kinerja diukur dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi aktual di lapangan sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Capaian kinerja SKIPM Pangkalpinang pada Triwulan IV Tahun 2025 didasarkan pada pengukuran 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup aspek operasional hingga tata kelola manajerial. Berdasarkan data pada aplikasi Kinerja per Desember 2025, SKIPM Pangkalpinang berhasil meraih nilai capaian sebesar 114,85 yang termasuk dalam kategori "Istimewa".

Capaian tersebut didistribusikan pada tiga Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).

Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
7. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
8. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
9. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
10. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai).
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
12. Persentase rencana umum pengadaan (PBJ) yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
14. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (unit).
15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Indeks).

Pada Triwulan IV Tahun 2025, SKIPM Pangkalpinang melaksanakan kegiatan melalui program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp5.396.679.000. Hingga akhir periode ini, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp5.182.733.007, atau setara dengan 96,04% dari total pagu yang tersedia. Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran yang optimal dalam mendukung seluruh target kinerja organisasi sepanjang tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut penerapan prinsip akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menciptakan birokrasi yang transparan, efisien, serta berorientasi pada pencapaian hasil yang nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan amanat tersebut, Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan ini juga berfungsi sebagai media evaluasi menyeluruh serta alat kendali manajemen dalam memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang memiliki peran strategis dalam menjamin mutu, keamanan, dan keberterimaan hasil perikanan Bangka Belitung di pasar domestik maupun internasional.

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Pangkalpinang selama periode Oktober hingga Desember 2025. Laporan ini diharapkan menjadi sarana komunikasi dan transparansi capaian kinerja kepada publik serta seluruh pemangku kepentingan.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Struktur organisasi SKIPM Pangkalpinang dirancang untuk mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian mutu melalui pembagian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Stasiun: Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam lingkup wilayah kerja.
2. Subbagian Umum: Menyelenggarakan urusan perencanaan, program, anggaran, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana, persuratan, kearsipan, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan rumah tangga.
3. Kelompok Jabatan Fungsional: Memberikan pelayanan fungsional teknis sesuai keahlian masing-masing, yang meliputi Pejabat Fungsional Karantina Ikan, Pengendali Mutu Hasil Perikanan, Pengawas Perikanan, serta tenaga teknis lainnya yang mendukung operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Struktur ini memastikan penyelenggaraan layanan publik yang profesional, responsif, dan akuntabel sesuai dengan standar kementerian guna menjamin mutu hasil perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Pangkalpinang

1.3. STRATEGI ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program SKIPM Pangkalpinang disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional. Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai).
5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai).

Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai).
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai).
8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai).
10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai).
11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%).
14. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Unit).
15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Indeks).

Sasaran-sasaran tersebut menjadi kerangka strategis dalam pelaksanaan program SKIPM Pangkalpinang sepanjang tahun 2025, dengan pendekatan pengukuran yang terintegrasi untuk menjamin tercapainya outcome organisasi yang optimal.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 disusun merujuk pada ketentuan yang berlaku, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan Menyajikan penjelasan umum mengenai latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta isu strategis (strategic issues) yang dihadapi organisasi dalam periode berjalan.
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja Menguraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, termasuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan capaian kinerja organisasi secara komprehensif untuk setiap indikator kinerja, perbandingan realisasi terhadap target, serta analisis evaluasi atas keberhasilan atau kendala yang dihadapi.
- d. Bab IV – Penutup Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah strategis yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian yang harus diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang telah disepakati.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Rincian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	92
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	71,5
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	100

		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Indeks)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	85
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (%)	70%
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Unit)	1
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene (Indeks)	3,36

Berdasarkan rincian indikator kinerja di atas, pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan pengukuran terhadap seluruh (15) indikator kinerja. Hal ini dikarenakan Triwulan IV merupakan periode akumulasi akhir tahun di mana seluruh target perjanjian kinerja wajib dipertanggungjawabkan capaiannya.

Kelima belas indikator tersebut menjadi fokus evaluasi utama SKIPM Pangkajene untuk mengukur keberhasilan organisasi secara komprehensif sepanjang Tahun 2025. Capaian terhadap indikator-indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan efektivitas pelaksanaan program pengendalian mutu, konsistensi penerapan standar, serta akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang transparan.

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU memperhitungkan jenis polarisasi yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

- a. Angka capaian maksimum adalah 120;
- b. Angka capaian minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU disesuaikan dengan jenis polarisasinya, yaitu:
 - 1) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target (semakin tinggi semakin baik), dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target (semakin rendah semakin baik), dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}})] \times 100\%$$

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}})] \times 100\%$$

3) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4) Kriteria Penilaian

Berdasarkan hasil perhitungan indeks capaian tersebut, status kinerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

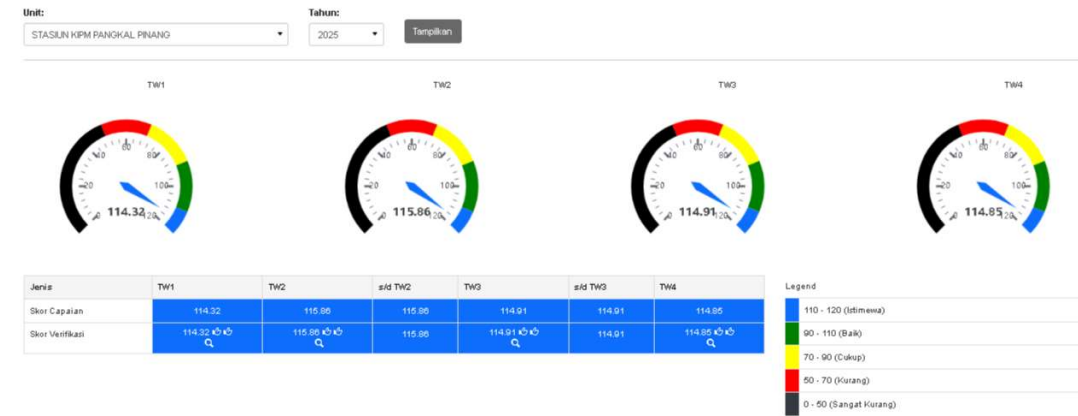
Angka Capaian	Kategori / Predikat
> 100 – 120	Istimewa
> 90 – 100	Sangat Baik
> 80 – 90	Baik
> 70 – 80	Cukup
> 60 – 70	Kurang
< 60	Sangat Kurang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja SKIPM Pangkalpinang pada Triwulan IV Tahun 2025 berhasil meraih predikat "Istimewa". Hal ini ditandai dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,85, berdasarkan hasil pelaporan dan verifikasi melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di laman www.kinerjaku.kkp.go.id.

Capaian nilai 114,85 ini menunjukkan bahwa SKIPM Pangkalpinang telah berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara konsisten hingga akhir tahun anggaran.



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan 1 :Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yagn memenuhi standar mutu dan kewan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indikator ini merupakan ukuran keberhasilan penerapan sistem jaminan mutu di sektor hulu, yang mencakup kepatuhan unit budidaya perikanan (CBIB/CPIB) serta unit penanganan di atas kapal (CPIB Kapal) terhadap standar keamanan pangan yang berlaku. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 70,00%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi hingga Triwulan IV, terealisasi sebesar 105,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120,00%. Capaian yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian mutu di sektor primer telah berjalan efektif, ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha yang patuh dan konsisten menerapkan standar Cara Budidaya dan Penanganan Ikan yang Baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan inspeksi, verifikasi, dan surveilan secara berkala terhadap unit produksi primer untuk memastikan konsistensi penerapan standar mutu. Langkah ini didukung dengan pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha budidaya dan nelayan mengenai urgensi sertifikasi, serta percepatan validasi dokumen jaminan mutu untuk menjamin ketertelusuran produk sejak dari hulu.

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan										
IK-1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	70	70	105	120	150.00	70	150.00

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Pengukuran kinerja terhadap pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen mencerminkan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu di tingkat Unit Pengolahan Ikan (UPI). Pada Tahun Anggaran 2025, target yang ditetapkan sebesar 70,00%. Berdasarkan evaluasi hingga Triwulan IV, indikator ini terealisasi sebesar 100,67% dengan capaian kinerja maksimal 120,00%. Hasil positif ini mengindikasikan bahwa mayoritas unit pengolahan di wilayah kerja SKIPM Pangkalpinang telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan kelayakan dasar dan penerapan sistem manajemen keamanan pangan.

Langkah strategis yang dilakukan meliputi pelaksanaan surveilan dan inspeksi rutin guna memantau konsistensi penerapan standar mutu di unit pengolahan maupun sarana distribusi. Upaya ini diperkuat dengan pendampingan teknis secara berkelanjutan kepada pelaku usaha dalam rangka percepatan penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta validasi penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk memastikan produk akhir aman dikonsumsi dan memenuhi persyaratan pasar.

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan										
IK-2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	70	70	100.67	120	143.81	70	142.81

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Kinerja ekspor komoditas perikanan menjadi salah satu tolok ukur fundamental dalam menilai keberhasilan sistem jaminan mutu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Rasio keberterimaan produk di negara tujuan secara langsung merefleksikan efektivitas pengawasan mutu dalam memastikan komoditas bebas dari penolakan (border rejection) akibat isu penyakit ikan maupun keamanan pangan. Bagi SKIPM Pangkalpinang, indikator ini memegang peranan vital untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan asal Bangka Belitung, mengingat standar persyaratan teknis yang diterapkan oleh negara mitra dagang kini semakin ketat dan dinamis.

Pada Tahun Anggaran 2025, komitmen untuk mempertahankan citra positif produk perikanan di pasar internasional ditunjukkan dengan penetapan target rasio ekspor sebesar 99,00%. Berdasarkan data lalu lintas ekspor dan validasi notifikasi hingga akhir Triwulan IV, tercatat realisasi sempurna sebesar 100,00%, yang menghasilkan angka capaian kinerja 101,01%. Angka ini menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, seluruh volume ekspor yang dilalulintaskan melalui SKIPM Pangkalpinang berhasil lolos masuk ke negara tujuan tanpa adanya kasus penolakan (Rapid Alert System) atau pengembalian produk dari negara mitra.

Capaian nirkasus penolakan ini merupakan buah dari ketatnya prosedur penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang dijalankan secara konsisten. Setiap permohonan ekspor wajib melalui tahapan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan spesifik negara mitra. Di sisi lain, penguatan fungsi surveilan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) berorientasi ekspor terus dilakukan guna menjamin kepatuhan penerapan HACCP, sehingga potensi ketidaksesuaian mutu dapat dideteksi dan dimitigasi sejak dini sebelum produk dikirimkan.

SP.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IK-3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	99	99	100	101.01	101.01	70	142.86

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar

IK4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan indikator vital untuk menjamin validitas hasil pengujian yang menjadi dasar penerbitan sertifikat kesehatan ikan. Penerapan standar ISO/IEC 17025:2017 secara konsisten memastikan bahwa laboratorium memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang mumpuni dalam menghasilkan data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah.

Pada Tahun Anggaran 2025, target nilai kualitas penerapan sistem ini ditetapkan sebesar 75,00. Berdasarkan penilaian kinerja hingga Triwulan IV, laboratorium SKIPM Pangkalpinang berhasil meraih nilai realisasi sebesar 100,00, yang menghasilkan capaian kinerja maksimal 120,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh persyaratan akreditasi telah dipenuhi secara optimal tanpa adanya temuan ketidaksesuaian yang signifikan, sekaligus mengonfirmasi kesiapan laboratorium dalam mendukung layanan pengujian yang kredibel.

Untuk mempertahankan status akreditasi dan kinerja tersebut, serangkaian langkah strategis terus dilakukan secara berkesinambungan. Upaya ini meliputi pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi efektivitas sistem, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan uji guna menjamin ketertelusuran pengukuran, hingga peningkatan kompetensi analis melalui partisipasi aktif dalam uji profisiensi dan pelatihan teknis.

SP.2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar											
IK-4 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	75	75	100	120	133.33	75	133.33

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Penilaian terhadap kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi di UPT SKIPM Pangkalpinang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses inspeksi berjalan sesuai prinsip ketertelusuran, ketidakberpihakan, serta konsistensi teknis. Nilai capaian yang dihasilkan menggambarkan tingkat kesesuaian lembaga inspeksi terhadap persyaratan yang diatur dalam ISO/IEC 17020:2012, di mana pada Tahun Anggaran 2025 target yang ditetapkan adalah sebesar 75,00 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BPPMHKP 2025-2029. Hingga berakhirnya periode Triwulan IV Tahun 2025 (Desember), SKIPM Pangkalpinang berhasil merealisasikan nilai kualitas sebesar 100,00. Berdasarkan formula penghitungan pada aplikasi Kinerjaku, capaian realisasi tersebut menghasilkan indeks kinerja maksimal sebesar 120,00%, yang menempatkan indikator ini pada predikat Istimewa.

Persentase capaian yang tinggi ini menandakan bahwa mayoritas persyaratan standar telah diterapkan secara efektif, mencakup pengelolaan dokumen, penguatan kompetensi personel inspeksi, mekanisme kalibrasi alat bantu pemeriksaan, hingga pengendalian risiko ketidakberpihakan yang ketat. Sebagai standar internasional yang mengatur tata cara kerja lembaga inspeksi, ISO/IEC 17020:2012 memberikan kerangka kerja agar setiap kegiatan pemeriksaan dilakukan secara sistematis, akurat, dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Bagi UPT SKIPM Pangkalpinang, penerapan standar ini menjadi landasan strategis dalam menjamin mutu layanan pemeriksaan fisik, kesehatan ikan, kelayakan unit, dan verifikasi teknis lainnya yang berkaitan langsung dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengukuran capaian indikator kinerja mutu lembaga inspeksi dilakukan melalui rangkaian kegiatan evaluasi internal yang terstruktur, meliputi pemeriksaan penerapan prosedur, audit mutu, validasi teknis, serta peninjauan berkala oleh manajemen melalui mekanisme tinjauan manajemen. Hasil evaluasi tersebut secara konsisten digunakan oleh pimpinan unit untuk menentukan prioritas perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) guna memastikan bahwa sistem manajemen mutu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan serta tuntutan regulasi terbaru, sehingga kredibilitas hasil inspeksi tetap terjaga dengan optimal sesuai standar Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SP.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar											
IK-5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	75	75	100	120	133.33	75	133.33	

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawsan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan tolak ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian ini ditinjau dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan belanja yang berkualitas (spending better). Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana, efisien, efektif, serta mematuhi seluruh ketentuan regulasi yang berlaku. Nilai IKPA diperoleh dari data proses pelaksanaan anggaran yang tercatat dalam aplikasi OMSPAN.

Capaian IKPA dihitung berdasarkan kepatuhan satker terhadap delapan komponen indikator, yaitu:

1. Revisi DIPA
Menilai ketepatan dan efisiensi proses revisi anggaran. Satker dinilai mampu melakukan revisi hanya jika diperlukan dan sesuai ketentuan sehingga tidak mengganggu alur pelaksanaan kegiatan.
2. Deviasi RPD (Rencana Penarikan Dana)
Menggambarkan selisih antara jadwal rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan di lapangan. Deviasi yang kecil menunjukkan bahwa satker telah merencanakan penarikan dana secara realistis dan disiplin.
3. Penyerapan Anggaran
Mengukur kemampuan satker dalam mengeksekusi anggaran sesuai target triwulan dan tahunan. Tingkat penyerapan yang baik menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pada UPT SKIPM Pangkalpinang.
4. Belanja Kontraktual
Komponen ini menilai ketepatan pelaporan kontrak barang/jasa serta percepatan pelaksanaan belanja berbasis kontrak. Penilaiannya menggunakan bobot komposit:
 - Ketepatan waktu input kontrak (40%)
 - Kontrak dini (30%)
 - Akselerasi belanja modal (30%)
5. Penyelesaian Tagihan
Mengukur kecepatan satker dalam memproses tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai. Standar yang digunakan adalah penyelesaian maksimal 17 hari kerja sejak serah terima pekerjaan.
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP (TUP)
Revolving UP dilakukan minimal satu kali setiap bulan tanpa keterlambatan, sedangkan pertanggungjawaban TUP wajib diselesaikan dalam satu bulan sesuai surat pernyataan penggunaan, tanpa menysakan dana yang dikembalikan.
7. Dispensasi SPM
Satker dinilai baik apabila mampu menghindari permintaan dispensasi penerbitan SPM, karena hal tersebut menunjukkan kedisiplinan dalam perencanaan dan proses administrasi belanja.
8. Konfirmasi Capaian Output
Output kegiatan wajib dikonfirmasi paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya untuk memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan realisasi output. Komponen ini mendukung prinsip belanja berkualitas (*spending better*) dalam penganggaran berbasis kinerja.

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 92,00. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi OM-SPAN hingga Triwulan IV, realisasi nilai IKPA mencapai 96,52 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,91%. Perolehan nilai di atas target ini merefleksikan bahwa tata kelola keuangan di lingkup SKIPM Pangkalpinang telah berjalan optimal, baik pada aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan, maupun kualitas hasil.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKPA dilakukan melalui langkah-langkah strategis, antara lain disiplin dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) agar nihil tepat waktu pada akhir tahun, menjaga akurasi rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA guna meminimalkan deviasi, serta percepatan pelaporan data capaian output yang valid dan terkonfirmasi. Koordinasi intensif dengan KPPN setempat juga terus dilakukan untuk memitigasi kendala teknis dalam proses pencairan anggaran dan penyelesaian tagihan.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	92	92	96.52	104.91	104.91	92	104.91	

IK7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Kualitas perencanaan penganggaran yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Indikator ini digunakan untuk mengukur kepatuhan dan konsistensi satuan kerja dalam menyusun rencana kegiatan yang selaras dengan alokasi anggaran, serta meminimalisir frekuensi revisi DIPA yang tidak perlu.

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 81,50. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hingga Triwulan IV, realisasi nilai kinerja perencanaan mencapai angka sempurna 100,00 dengan tingkat capaian kinerja maksimal sebesar 120,00%. Hasil ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan di SKIPM Pangkalpinang telah dilaksanakan dengan sangat matang, akurat, dan konsisten antara rencana penarikan dengan realisasi di lapangan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang berbasis data riil dan prioritas, pelaksanaan reuviu DIPA secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pergeseran anggaran sejak dini, serta penguatan koordinasi antara tim perencanaan dan pejabat pembuat komitmen guna memastikan setiap usulan kegiatan dapat dieksekusi tanpa kendala administratif.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	71.5	71.5	100	120	139.86	81,5	122.70	

IK8. Prossntase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan indikator krusial yang mencerminkan komitmen satuan kerja terhadap akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara. Pada Tahun 2025, target penyelesaian ditetapkan secara mutlak sebesar 100,00%. Berdasarkan data pemantauan hingga akhir Triwulan IV, SKIPM Pangkalpinang berhasil menuntaskan seluruh rekomendasi dengan realisasi 100,00% dan capaian kinerja 100,00%. Hal ini menegaskan bahwa tidak terdapat tunggakan tindak lanjut, di mana seluruh rekomendasi telah berstatus sesuai dan tuntas.

Langkah responsif dilakukan segera setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima, meliputi koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal dalam menelaah rekomendasi serta perbaikan sistem pengendalian internal untuk memitigasi risiko berulangnya temuan serupa di masa mendatang.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK-8	Prosentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	100	100	100	100	100.00	100	100

IK9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk memetakan kualitas sumber daya manusia aparatur berdasarkan empat dimensi fundamental, yakni: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indikator ini tidak hanya mencerminkan statistik kepegawaian semata, melainkan menjadi tolok ukur kesiapan organisasi dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, berkinerja tinggi, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Pada Tahun Anggaran 2025, target indeks profesionalitas yang ditetapkan adalah sebesar 82,00. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan validasi data kepegawaian hingga Triwulan IV, SKIPM Pangkalpinang berhasil mencatatkan realisasi indeks sebesar 86,49 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,48%. Capaian yang melampaui ekspektasi ini mengindikasikan bahwa komposisi pegawai di lingkungan SKIPM Pangkalpinang telah didominasi oleh aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan linier, kompetensi teknis yang mumpuni, serta rekam jejak kinerja dan disiplin yang sangat baik.

Akselerasi peningkatan profesionalitas ini ditempuh melalui berbagai langkah strategis yang berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi fasilitasi tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan formal, pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan teknis dan manajerial (diklat) minimal 20 JP per tahun untuk pengayaan kompetensi, serta penerapan sistem manajemen kinerja (SKP) yang objektif dan terukur. Selain itu, penegakan disiplin pegawai dilakukan secara konsisten melalui monitoring kehadiran dan kepatuhan terhadap kode etik, guna memastikan integritas ASN tetap terjaga.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK-9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang										
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	-	82	82	86.49	105.48	105.48	82	105.48

IK10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Untuk pencapaian hasil penilaian Inspektorat Jenderal sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assesment) akan melengkapi

keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja. Terkait hal tersebut, kelengkapan dokumen SAKIP UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang telah disampaikan baik melalui Gdrive, LKE Aplikasi E-Kinerjaku KKP maupun Aplikasi ESR Menpan.

Penilaian indikator nilai SAKIP UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang dilakukan oleh Sekretariat BPPMHKP yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi untuk menilai aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Pada tahun 2025, target nilai SAKIP UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang adalah 86,00 dan berhasil tercapai dengan mendapatkan nilai akuntabilitas 87,10 (Capaian 101,28%) dengan Predikat A berdasarkan LKE penilaian mandiri.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	86	86	87.1	101.28	101.28	86	101.28	

IK11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Pangkalpinang

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan indikator strategis yang mengukur tingkat kepatuhan dan responsivitas organisasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan, baik internal maupun eksternal. Indikator ini menjadi parameter utama dalam menilai efektivitas upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan menjadi pijakan fundamental dalam melakukan koreksi menyeluruh terhadap proses bisnis organisasi.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 85,00%. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir Triwulan IV, indikator ini berhasil direalisasikan secara optimal sebesar 100,00%, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 117,65%. Angka realisasi sempurna ini mencerminkan bahwa seluruh rekomendasi pengawasan yang diterima sepanjang tahun 2025 telah ditindaklanjuti secara tuntas dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Pemanfaatan hasil pengawasan ini telah diimplementasikan secara konkret melalui berbagai langkah perbaikan, meliputi penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) layanan, penguatan sistem pengendalian internal, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Tindak lanjut yang konsisten ini menjadi bukti akuntabilitas dan komitmen kuat UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam menjaga integritas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	85	85	100	117.65	117.65	85	117.65	

IK12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen vital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengumuman RUP melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertujuan untuk memberikan informasi terbuka kepada publik mengenai kegiatan pengadaan dalam satu tahun anggaran, sekaligus mencerminkan kualitas perencanaan pengadaan satuan kerja.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator ini ditetapkan dengan target sebesar 76,00%. Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun, indikator ini berhasil direalisasikan secara maksimal sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerja mencapai 120,00%. Capaian sempurna ini menunjukkan bahwa SKIPM Pangkajene telah mematuhi kewajiban pengumuman RUP secara tertib dan akurat sesuai dengan total pagu pengadaan yang dikelola.

Pengukuran indikator ini dihitung dengan rumus berikut:

$$(\text{Nilai RUP yang diumumkan di SIRUP} / \text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}) \times 100\%$$

Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi intensif antara operator SIRUP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memverifikasi rincian kegiatan pengadaan. Selain itu, dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap rencana kegiatan dalam dokumen RKA-K/L, serta memastikan proses pengunggahan data ke aplikasi SIRUP dilakukan secara lengkap dan tepat waktu sebelum tahun anggaran berjalan efektif.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	76	76	100	120	131.58	76	131.58	

IK13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene

Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas pada UPT Stasiun KIPM Pangkajene merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen satuan kerja dalam melengkapi dokumen prasyarat pembangunan Zona Integritas sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP. Fokus penilaian terletak

pada kesiapan bukti dukung (eviden) dan implementasi konkret langkah-langkah pencegahan korupsi guna mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Struktur penilaian indikator ini mengacu pada enam komponen pengungkit utama sistem antikorupsi dengan bobot proporsional, yakni: Manajemen Perubahan/Zona Integritas (30%), Pengendalian Gratifikasi (15%), Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (15%), Penanganan Benturan Kepentingan (15%), Pelaporan Harta Kekayaan ASN (15%), serta Pengendalian Kecurangan (10%). Pemenuhan keenam komponen ini menjadi barometer utama akuntabilitas langkah penguatan integritas yang telah dilaksanakan organisasi.

Pada Tahun Anggaran 2025, target pemenuhan dokumen ditetapkan sebesar 100% (atau sesuai target Bapak, misal: Indeks 80). Hingga akhir Triwulan IV, SKIPM Pangkalpinang telah berhasil merampungkan dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam siklus penilaian tahunan (Realisasi 100%). Saat ini, dokumen tersebut telah berstatus lengkap dan berada dalam tahap finalisasi evaluasi/validasi oleh Inspektorat Jenderal untuk penetapan nilai indeks integritas nasional.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	70	70	80.8	115.43	115.43	70	115.43	

IK14. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Inovasi Pelayanan Publik pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan satuan kerja dalam menghadirkan pembaharuan layanan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Inovasi ini dapat berupa penyederhanaan proses layanan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, maupun pengembangan mekanisme pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Upaya ini bertujuan mendorong terciptanya pelayanan yang responsif, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengguna layanan.

Pengukuran kinerja inovasi dilakukan untuk menilai sejauh mana satuan kerja mampu menghasilkan perubahan yang berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan, mulai dari efisiensi waktu, kemudahan prosedur, hingga peningkatan indeks kepuasan pengguna. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip reformasi birokrasi, keberlanjutan pelaksanaan (sustainability), serta kontribusinya terhadap kinerja pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 1 (satu) Inovasi. Hingga akhir Triwulan IV, UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang berhasil mewujudkan target tersebut dengan mencatatkan Realisasi 1 Inovasi, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Keberhasilan implementasi inovasi ini menjadi bukti komitmen satuan kerja dalam melakukan terobosan perbaikan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	1	1	1	100	100.00	1	100	

IK15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolok ukur fundamental untuk mengetahui persepsi pengguna jasa terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPT Stasiun KIPM Pangkajene. Pengukuran ini dilakukan secara transparan menggunakan sistem survei elektronik (e-survey) melalui laman resmi <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/52>. Penilaian mencakup 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai standar regulasi, yakni: persyaratan, sistem/mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan/saran/masukan, serta kualitas sarana dan prasarana.

Pada Tahun Anggaran 2025, target indeks yang ditetapkan adalah sebesar 88,00. Berdasarkan hasil survei kumulatif hingga Triwulan IV, UPT Stasiun KIPM Pangkajene berhasil meraih indeks realisasi sebesar 97,46. Dengan perolehan tersebut, capaian kinerja indikator ini tercatat sebesar 110,75%. Tingginya indeks ini merefleksikan bahwa mutu pelayanan yang diberikan telah memenuhi, bahkan melampaui harapan pengguna jasa dan berada pada kategori kinerja pelayanan "Sangat Baik".

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan ini terus dilakukan melalui tindak lanjut atas saran dan masukan yang masuk dalam survei. Langkah konkret yang dilaksanakan meliputi peningkatan fasilitas ruang pelayanan publik yang ramah pengguna, percepatan durasi layanan melalui digitalisasi sistem, serta pengembangan kompetensi petugas pelayanan (front office) agar senantiasa melayani dengan sikap responsif, ramah, dan profesional (5S).

SP.3	Tatakelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkajene											
Realisasi TW IV 2020-2025					REALISASI 2025					RENSTRA 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW IV 2025	Realisasi TW IV 2025	% Realisasi thd Target TW IV 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	-	3.36	3.36	3.89	115.77	115.77	3.36	115.77	

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM PANGKALPINANG pada tahun anggaran sebesar Rp. 5.396.679.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 5.204.669.000 dan PNPB sebesar Rp. 192.010.000

Realisasi penyerapan anggaran SKIPM PANGKALPINANG pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp. . 5.182.733.007 atau sebesar 96,04 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Pangkalpinang T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan IV 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	5.060639.000	4.990.351.032	98,61
2	Pengendalian Mutu	145.000.000	24.535.825	16,92
3	Manajemen Mutu	191.040.000	167.846.150	87,86
	TOTAL	5.396.679.000	5.182.733.007	96,04

Tabel 3. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW IV	%
1	Belanja Pegawai	3.173.419.000	3.139.913.611	98,94
2	Belanja Barang	2.223.260.000	2.042.819.396	91,88
	TOTAL	5.396.679.000	5.182.733.007	96,04

3.4. EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran pada UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang bertujuan untuk menilai sejauh mana satuan kerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya anggaran secara optimal. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan satker dalam mengelola alokasi anggaran secara tepat sasaran, meminimalkan pemborosan, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tugas dan fungsi pelayanan karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Upaya efisiensi dilakukan melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, pemanfaatan SDM secara efektif, serta penyesuaian pelaksanaan program agar tetap berjalan produktif sesuai koridor anggaran yang tersedia.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang menargetkan enam kegiatan yang menjadi bagian dari indikator kinerja unit. Keseluruhan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan dukungan anggaran DIPA Tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp 5.396.679.000. Hingga akhir periode Triwulan IV, realisasi anggaran telah mencapai Rp 5.182.733.007, atau sebesar 96,04% dari total pagu. Persentase realisasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif sesuai dengan perencanaan, di mana anggaran terserap secara optimal untuk mendukung capaian kinerja dan target output pada periode pelaporan.

Capaian ini menggambarkan bahwa UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang mampu menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan pengelolaan anggaran yang terukur dan tingkat penyerapan yang mencapai 96,04%, kegiatan operasional dan pelayanan publik dapat berjalan dengan maksimal tanpa mengurangi kualitas layanan maupun akuntabilitas pelaksanaan program.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengukuran capaian indikator kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang secara umum telah berjalan dengan sangat baik, efektif, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan rincian capaian yang diurutkan sebagai berikut:

1. IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (Capaian 120,00%).
2. IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (Capaian 120,00%).
3. IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor (Capaian 101,01%).
4. IK4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (Capaian 120,00%).
5. IK5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi (Capaian 120,00%).
6. IK6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Capaian 104,91%).
7. IK7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Capaian 120,00%).
8. IK8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK (Capaian 100,00%).
9. IK9. Indeks Profesionalitas ASN (Capaian 105,48%).
10. IK10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP (Capaian 101,28%).
11. IK11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (Capaian 117,65%).
12. IK12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan di SIRUP (Capaian 120,00%).
13. IK13. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas (Capaian 115,43%).
14. IK14. Inovasi Pelayanan Publik (Capaian 100,00%).
15. IK15. Indeks Kepuasan Masyarakat (Capaian 115,77%).

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi serapan hingga akhir Triwulan IV mencapai Rp5.182.733.007 atau sebesar 96,04% dari total pagu anggaran sebesar Rp5.396.679.000. Tingginya persentase realisasi ini mengindikasikan bahwa perencanaan kegiatan telah dieksekusi dengan baik dan anggaran terserap maksimal untuk mendukung operasional layanan.

Secara keseluruhan, kinerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Tahun 2025 menunjukkan performa "Istimewa", dengan tata kelola yang akuntabel serta komitmen yang kuat terhadap penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

4.2. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kinerja pada Tahun Anggaran 2026 serta mempertahankan pencapaian kinerja predikat "Istimewa" yang telah diraih pada tahun 2025, berikut beberapa rekomendasi strategis yang perlu dilaksanakan:

1. Penguatan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Mempertahankan konsistensi penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 melalui pelaksanaan audit internal yang lebih ketat dan peningkatan kompetensi personel, guna memastikan jaminan mutu hasil perikanan tetap valid dan terpercaya.
2. Akselerasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Melakukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran (Triwulan I 2026), termasuk percepatan proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun dan meningkatkan nilai IKPA.
3. Optimalisasi Inovasi dan Digitalisasi Layanan Mengembangkan inovasi pelayanan publik yang lebih adaptif berbasis teknologi informasi serta memastikan integrasi data digital untuk mempermudah aksesibilitas pengguna jasa dan transparansi proses bisnis.
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja Menyusun dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja Tahun 2026 yang lebih tajam (cascading) dan selaras dengan target strategis kementerian, serta meminimalisir revisi anggaran melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang akurat pada Halaman III DIPA.

5. Penguatan Pembangunan Zona Integritas Meningkatkan internalisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai dan melengkapi seluruh eviden pengungkit sebagai langkah strategis untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada periode penilaian mendatang.

Dengan pelaksanaan rekomendasi yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang mampu mempertahankan tren kinerja positif ini pada tahun mendatang. Dedikasi terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, serta komitmen terhadap pelayanan prima akan menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing dan kepercayaan publik terhadap institusi.